



## Analisis Tingkat Efisiensi, Efektivitas dan Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara)

Haryatmoko<sup>a\*</sup>, Swarmilah Hariani<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mercu Buana, Indonesia

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Receied : 03-02-2026

Reised : 25-02-2026

Accepted :30-02-2026

**Keywords:** Budget, Decentralization of Regional Original Income, Effectiveness, Efficiency, Local Government Performance

**Kata Kunci:** Anggaran, Desentralisasi Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Efisiensi, Kinerja Pemerintah Daerah

Corresponding Author:

[haryatmoko@gmail.com](mailto:haryatmoko@gmail.com)\*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the performance of local governments in all districts in Province of North Sumatra for the 2017-2021 budget year. The data used is secondary data obtained from the Audit Board of the Republic of Indonesia in the form of a Budget Realization Report for the 2017-2021 fiscal year.*

*This study is a descriptive study using an analysis of regional independence ratios and financial ratios to assess the performance of local governments in all districts in Province of North Sumatra. The results showed that the development of the level of efficiency in the management of regional expenditures of all districts in Province of North Sumatra, it can be said less efficient which is the percentage of average yield above 90%. And then for the development of the level of effectiveness of the management of Regional Original Income, it can be said to be effective, namely with an average yield of above 80%, while for the decentralization of Regional Original Income is on the low level.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah di seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2017-2021. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017-2021.

Penelitian ini merupakan kajian deskriptif menggunakan analisis rasio kemandirian daerah dan rasio keuangan untuk menilai kinerja pemerintah daerah di seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tingkat efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, dapat dikatakan kurang efisien yaitu

persentase hasil rata-rata di atas 90%. Dan kemudian untuk pengembangan tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan efektif, yaitu dengan rata-rata imbal hasil di atas 80%, sedangkan untuk desentralisasi Pendapatan Asli Daerah berada pada tingkat rendah.

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas kepada daerah, menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dikarenakan semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Anasta dan Ambarwati, 2023). Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah tercermin dari kinerja keuangan daerah. Mahsun, dkk. (2007:157) menyatakan kinerja keuangan daerah merupakan suatu bentuk hasil pencapaian yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil perbandingan realisasi pendapatan atau belanja yang diterima dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan jumlah pendapatan dan belanja yang telah dianggarkan oleh pemerintah sebelumnya dalam APBD. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah ini dihitung dengan menggunakan rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Soebagiyo dan Prajwalita, 2021:2).

Pemeriksaan atas kinerja pengelolaan terhadap APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan ukuran untuk menilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak (Noerainy dan Karina, 2016). Sebagai salah satu komponen laporan keuangan, laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (Fitra, 2019).

Namun sampai saat ini, meskipun pemberian desentralisasi fiskal atau otonomi daerah sudah dilakukan yaitu dengan memberikan sumber-sumber pendanaan kepada daerah, tata kelola penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah dianggap belum optimal. Kinerja pemerintah daerah dianggap belum fokus dalam mengelola APBD. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tingkat persentase PAD di dalam APBN yang cukup jauh yang dikarenakan belum maksimalnya peranan pemerintah dalam menghasilkan PAD sehingga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat (LHP BPK RI, 2017-2021).

Salah satu tujuan dilakukannya analisis kinerja keuangan daerah adalah untuk

mengetahui fluktuasi kinerja keuangan pemerintah daerah selama periode tertentu. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten di propinsi Sumatera Utara maka akan dilakukan analisis rasio keuangan antara APBD dengan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2017-2021 yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten di propinsi Sumatera Utara. Dan untuk perhitungan rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efisiensi keuangan, rasio efektifitas keuangan, dan rasio derajat desentralisasi fiskal.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran kondisi keuangan pemerintah daerah pada suatu periode atau suatu siklus akuntansi, yang didalamnya berisi sumber-sumber pendapatan atau penghimpunan dana dan penyaluran atau penggunaan dana (Dwiastuti dan Supardi, 2021:25). Menurut Mardiasmo (2004) dalam Purwanti (2021), pengukuran kinerja sektor publik menggunakan alat ukur finansial dan non finansial yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD.

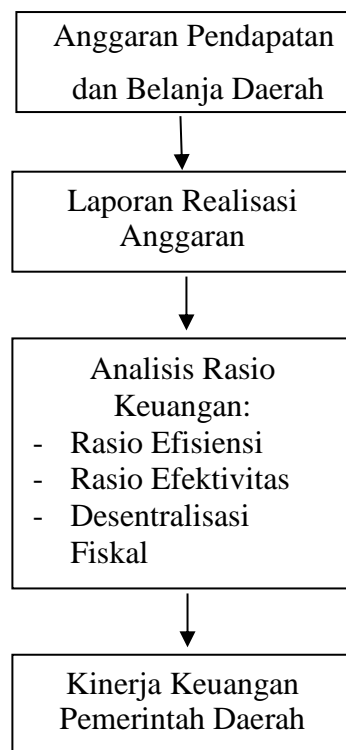
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun (Keintjem dan Murni (2022)). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam Permendagri No. 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 1 ayat 1, yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pendapatan daerah merupakan semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah yang dikelompokkan atas pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Halim dan Kusufi, 2012). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Dalam penelitian ini analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio, yaitu: 1) **Rasio Efisiensi**; Ridho (2019:20) mengatakan rasio keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100%. Semakin kecil

rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik, 2) **Rasio Efektivitas**; Halim (dalam Ridho, 2019) mengatakan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sedangkan Mardiasmo (dalam Awani, 2020) mengatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, 3) **Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**; Harahap (2020:35) mengatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Sedangkan Oates (1993) mengatakan desentralisasi fiskal telah menjadi sebuah rujukan penting untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi lebih baik. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Model yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.** Model Penelitian

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang

tengah berlangsung pada saat penelitian ini akan berlangsung atau selama kurun waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut (Sugiyono, 2008 dalam Rahmayati, 2016). Metode studi kasus ini akan dibatasi oleh bukti-bukti kuantitatif berupa angka-angka yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan data arsip/dokumen (*library research*). Data yang didapat dari teknik pengumpulan arsip adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2016) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Dokumen yang dikumpulkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatra Utara periode 2017-2021. Data yang diperoleh dari sumber publikasi Badan Pemeriksa Keuangan yaitu melalui <https://e-ppid.bpk.go.id/>, jurnal-jurnal ilmiah, buku pustaka, serta materi-materi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah mengerti dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data diantaranya:

1. Membuat tabel ringkasan pendapatan dan belanja daerah
2. Menghitung rasio keuangan (rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio desentralisasi) berdasarkan data yang diperoleh dengan membuat tabel
3. Membuat tabel dari hasil perhitungan rasio keuangan dari setiap periode
4. Mendeskripsikan data yang merupakan hasil perhitungan rasio keuangan atau melalui grafik yang disajikan.

Dalam menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di propinsi Sumatra Utara pada periode 2017-2021, rumus-rumus yang digunakan diantaranya:

#### **a. Rasio Efisiensi**

Ridho (2019:20) mengatakan rasio keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: (Halim, 2007)

### b. Rasio Efektivitas

Halim (dalam Ridho, 2019) mengatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2010)

### c. Rasio Desentralisasi

Harahap (2020) mengatakan rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: (Halim, 2007)

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.** Rata-rata Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara Tahun 2017-2021

No.	Nama Daerah	Efisiensi									
		2021	Ket.	2020	Ket.	2019	Ket.	2018	Ket.	2017	Ket.
1	Kab. Asahan	96,84%	K	98,50%	K	102,96%	T	100,45%	T	111,75%	T
2	Kab. Batu Bara	103,20%	T	102,67%	T	100,43%	T	94,61%	K	100,22%	T
3	Kab. Dairi	99,36%	K	100,34%	T	96,88%	K	102,69%	T	101,15%	T
4	Kab. Deli Serdang	112,75%	T	98,17%	K	100,79%	T	101,76%	T	101,37%	T
5	Kab. Humbang Hasundutan	99,37%	K	100,12%	T	98,28%	K	100,11%	T	100,89%	T
6	Kab. Karo	120,93%	T	105,05%	T	107,47%	T	93,49%	K	104,65%	T
7	Kab. Labuhanbatu	106,73%	T	100,86%	T	103,70%	T	94,20%	K	108,20%	T

No.	Nama Daerah	Efisiensi									
		2021	Ket.	2020	Ket.	2019	Ket.	2018	Ket.	2017	Ket.
8	Kab. Labuhanbata Selatan	105,06%	T	96,65%	K	97,65%	K	98,03%	K	103,60%	T
9	Kab. Labuhanbata Utara	108,49%	T	100,94%	T	104,99%	T	94,49%	K	93,73%	K
10	Kab. Langkat	110,71%	T	118,66%	T	64,87%	C	99,89%	K	100,39%	T
11	Kab. Mandailing Natal	95,01%	K	103,51%	T	96,00%	K	98,94%	K	102,16%	T
12	Kab. Nias	94,88%	K	127,04%	T	179,01%	T	124,66%	T	101,28%	T
13	Kab. Nias Barat	121,19%	T	103,46%	T	95,23%	K	99,07%	K	98,32%	K
14	Kab. Nias Selatan	134,91%	T	106,58%	T	99,82%	K	100,57%	T	94,64%	K
15	Kab. Nias Utara	124,14%	T	105,34%	T	94,92%	K	99,32%	K	104,55%	T
16	Kab. Padang Lawas	128,69%	T	99,86%	K	100,73%	T	103,66%	T	100,93%	T
17	Kab. Padang Lawas Utara	127,24%	T	96,35%	K	99,37%	K	101,75%	T	106,44%	T
18	Kab. Pakpak Bharat	97,33%	K	101,20%	T	98,76%	K	96,39%	K	98,28%	K
19	Kab. Samosir	113,83%	T	101,24%	T	96,60%	K	100,15%	T	104,89%	T
20	Kab. Serdang Bedagai	120,63%	T	101,55%	T	100,02%	T	100,23%	T	100,30%	T
21	Kab. Simalungun	111,00%	T	98,29%	K	98,11%	K	103,50%	T	103,46%	T
22	Kab. Tapanuli Selatan	101,85%	T	103,64%	T	99,53%	K	96,08%	K	95,93%	K
23	Kab. Tapanuli Tengah	99,86%	K	106,46%	T	101,66%	T	94,58%	K	102,41%	T
24	Kab. Tapanuli Utara	122,03%	T	115,14%	T	98,03%	K	100,27%	T	98,56%	K
25	Kab. Toba	94,15%	K	99,17%	K	98,69%	K	106,05%	T	96,26%	K
26	Kota Binjai	100,50%	T	99,72%	K	99,36%	K	103,71%	T	96,60%	K
27	Kota Gunungstoli	116,26%	T	102,20%	T	100,21%	T	103,71%	T	112,52%	T
28	Kota Medan	89,57%	C	96,89%	K	91,70%	K	99,09%	K	99,70%	K
29	Kota Padang Sidempuan	99,26%	K	90,24%	K	95,57%	K	101,60%	T	96,68%	K
30	Kota Pematangsiantar	97,61%	K	102,44%	T	93,01%	K	101,59%	T	107,41%	T
31	Kota Sibolga	98,59%	K	92,08%	K	95,22%	K	102,31%	T	97,05%	K
32	Kota Tanjungbalai	93,63%	K	97,90%	K	100,12%	T	103,51%	T	106,46%	T
33	Kota Tebing Tinggi	96,61%	K	99,24%	K	96,86%	K	104,05%	T	98,23%	K
	Rata-rata Kab./Kota	128,31%	T	100,61%	T	98,95%	K	101,09%	T	101,61%	T

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis laporan realisasi anggaran seluruh kabupaten/kota di propinsi Sumatra Utara periode tahun 2017-2021 diperoleh gambaran bahwa tingkat efisiensi belanja daerah masih berada pada posisi tidak efisien yaitu rata-rata persentase efisiensi belanja adalah diatas 100%. Hal ini menandakan bahawa Pemerintah Daerah belum dapat mengoptimalkan pendapatan yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan (belanja) daerahnya. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan kinerja Pemerintah Daerah masih belum optimal, hal ini dikarenakan jumlah belanja masih lebih tinggi

dibandingkan pendapatan yang dimiliki.

**Tabel 2.** Rata-rata Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara Tahun 2017-2021

No.	Nama Daerah	Efektivitas									
		2021	Ket.	2020	Ket.	2019	Ket.	2018	Ket.	2017	Ket.
1	Kab. Asahan	96,84%	E	77,14%	KE	89,18%	CE	95,62%	E	95,42%	E
2	Kab. Batu Bara	103,20%	SE	100,90%	SE	142,61%	SE	101,83%	SE	99,98%	E
3	Kab. Dairi	99,36%	E	103,64%	SE	87,15%	CE	74,74%	KE	104,04%	SE
4	Kab. Deli Serdang	112,75%	SE	73,58%	KE	70,68%	KE	126,84%	SE	93,06%	E
5	Kab. Humbang Hasundutan	99,37%	E	96,87%	E	111,40%	SE	150,26%	SE	102,89%	SE
6	Kab. Karo	120,93%	SE	112,10%	SE	112,14%	SE	106,63%	SE	109,17%	SE
7	Kab. Labuhanbatu	106,73%	SE	71,50%	KE	72,96%	KE	90,17%	E	75,80%	KE
8	Kab. Labuhanbatu Selatan	105,06%	SE	89,24%	CE	93,63%	E	91,13%	E	100,40%	SE
9	Kab. Labuhanbatu Utara	108,49%	SE	99,24%	E	111,65%	SE	111,63%	SE	99,00%	E
10	Kab. Langkat	110,71%	SE	101,03%	SE	107,03%	SE	91,77%	E	103,81%	SE
11	Kab. Mandailing Natal	95,01%	E	96,93%	E	82,21%	CE	63,97%	KE	46,18%	TE
12	Kab. Nias	94,88%	E	106,13%	SE	113,62%	SE	96,47%	E	110,15%	SE
13	Kab. Nias Barat	121,19%	SE	91,32%	E	86,50%	CE	80,39%	CE	38,65%	TE
14	Kab. Nias Selatan	134,91%	SE	88,39%	CE	99,10%	E	93,01%	E	110,74%	SE
15	Kab. Nias Utara	124,14%	SE	40,27%	TE	462,21%	SE	35,82%	TE	26,75%	TE
16	Kab. Padang Lawas	128,69%	SE	54,24%	TE	81,41%	CE	79,67%	CE	82,28%	CE
17	Kab. Padang Lawas Utara	127,24%	SE	90,04%	E	87,92%	CE	80,53%	CE	99,31%	E
18	Kab. Pakpak Bharat	97,33%	E	101,11%	SE	113,40%	SE	84,97%	CE	100,27%	SE
19	Kab. Samosir	113,83%	SE	90,59%	E	93,16%	E	87,40%	CE	98,60%	E
20	Kab. Serdang Bedagai	120,63%	SE	102,35%	SE	106,61%	SE	89,59%	CE	93,63%	E
21	Kab. Simalungun	111,00%	SE	90,51%	E	99,35%	E	24,65%	TE	47,55%	TE
22	Kab. Tapanuli Selatan	101,85%	SE	98,91%	E	103,27%	SE	100,28%	SE	89,16%	CE
23	Kab. Tapanuli Tengah	99,86%	E	85,26%	CE	78,57%	KE	77,26%	KE	87,62%	CE
24	Kab. Tapanuli Utara	122,03%	SE	129,44%	SE	92,11%	E	91,75%	E	102,77%	SE
25	Kab. Toba	94,15%	E	108,48%	SE	93,96%	E	95,62%	E	100,98%	SE
26	Kota Binjai	100,50%	SE	60,74%	KE	60,10%	KE	66,61%	KE	81,72%	CE
27	Kota Gunungsitoli	116,26%	SE	87,97%	CE	96,04%	E	86,47%	CE	81,56%	CE
28	Kota Medan	89,57%	CE	83,22%	CE	79,11%	KE	77,45%	KE	85,62%	CE
29	Kota Padang Sidempuan	99,26%	E	101,58%	SE	89,27%	CE	82,35%	CE	91,21%	E
30	Kota Pematangsiantar	97,61%	E	130,54%	SE	104,46%	SE	106,92%	SE	89,25%	CE
31	Kota Sibolga	98,59%	E	89,43%	CE	79,15%	KE	66,41%	KE	90,69%	E

No.	Nama Daerah	Efektivitas									
		2021	Ket.	2020	Ket.	2019	Ket.	2018	Ket.	2017	Ket.
32	Kota Tanjungbalai	93,63%	E	70,65%	KE	59,83%	TE	107,78%	SE	88,24%	CE
33	Kota Tebing Tinggi	96,61%	E	82,11%	CE	96,86%	E	108,02%	SE	93,15%	E
	Rata-rata Kab./Kota	104,51%	SE	90,13%	E	97,39%	E	88,32%	CE	88,21%	CE

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas seluruh kabupaten/kota di propinsi Sumatra Utara periode tahun 2017-2021 diperoleh gambaran bahwa rata-rata tingkat efektivitas berada pada angka diatas 80% dan dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mempertahankan perolehan pendapatan asli daerah yang dimilikinya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan kinerja Pemerintah Daerah sudah cukup baik karena mampu menghasilkan pendapatan asli daerah yang direncanakan secara efektif.

**Tabel 3.** Rata-rata Rasio Desentralisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara Tahun 2017-2021

No.	Nama Daerah	Desentralisasi									
		2021	Ket.	2020	Ket.	2019	Ket.	2018	Ket.	2017	Ket.
1	Kab. Asahan	8,20%	SR	9,79%	SR	8,68%	SR	8,85%	SR	8,31%	SR
2	Kab. Batu Bara	14,94%	R	14,07%	R	10,83%	R	6,11%	SR	6,29%	SR
3	Kab. Dairi	6,33%	SR	8,51%	SR	6,37%	SR	6,84%	SR	11,33%	R
4	Kab. Deli Serdang	26,17%	C	24,28%	C	23,10%	C	27,52%	C	25,49%	C
5	Kab. Humbang Hasundutan	7,98%	SR	7,23%	SR	7,32%	SR	10,10%	R	9,00%	SR
6	Kab. Karo	8,00%	SR	7,91%	SR	8,26%	SR	10,65%	R	10,86%	R
7	Kab. Labuhanbatu	17,75%	R	13,71%	R	13,30%	R	13,33%	R	10,71%	R
8	Kab. Labuhanbatu Selatan	6,73%	SR	6,48%	SR	7,79%	SR	5,88%	SR	9,78%	SR
9	Kab. Labuhanbatu Utara	5,67%	SR	5,73%	SR	6,48%	SR	5,52%	SR	5,02%	SR
10	Kab. Langkat	6,99%	SR	7,95%	SR	7,09%	SR	6,14%	SR	6,05%	SR
11	Kab. Mandailing Natal	8,38%	SR	6,00%	SR	5,86%	SR	5,57%	SR	5,27%	SR
12	Kab. Nias	11,75%	R	11,63%	R	11,16%	R	9,84%	SR	10,99%	R
13	Kab. Nias Barat	2,86%	SR	3,02%	SR	2,47%	SR	5,61%	SR	5,62%	SR
14	Kab. Nias Selatan	2,34%	SR	1,14%	SR	1,96%	SR	1,68%	SR	1,64%	SR
15	Kab. Nias Utara	2,71%	SR	7,60%	SR	6,55%	SR	6,71%	SR	2,91%	SR
16	Kab. Padang Lawas	4,39%	SR	4,25%	SR	4,59%	SR	4,61%	SR	4,54%	SR
17	Kab. Padang Lawas Utara	3,77%	SR	4,63%	SR	3,58%	SR	6,99%	SR	6,69%	SR
18	Kab. Pakpak Bharat	4,62%	SR	4,44%	SR	5,74%	SR	3,75%	SR	5,72%	SR
19	Kab. Samosir	7,26%	SR	7,56%	SR	6,84%	SR	5,91%	SR	8,77%	SR

No.	Nama Daerah	Desentralisasi									
		2021	Ket.	2020	Ket.	2019	Ket.	2018	Ket.	2017	Ket.
20	Kab. Serdang Bedagai	8,54%	SR	8,02%	SR	9,09%	SR	12,44%	R	7,48%	SR
21	Kab. Simalungun	7,96%	SR	7,32%	SR	8,15%	SR	7,48%	SR	10,97%	R
22	Kab. Tapanuli Selatan	8,86%	SR	10,13%	R	11,39%	R	10,23%	R	8,40%	SR
23	Kab. Tapanuli Tengah	7,27%	SR	7,38%	SR	7,33%	SR	6,30%	SR	6,65%	SR
24	Kab. Tapanuli Utara	11,48%	R	10,33%	R	8,55%	SR	8,19%	SR	13,30%	R
25	Kab. Toba	6,98%	SR	5,70%	SR	6,33%	SR	5,26%	SR	4,80%	SR
26	Kota Binjai	10,59%	R	12,73%	R	11,96%	R	15,08%	R	15,83%	R
27	Kota Gunungsitoli	3,02%	SR	3,63%	SR	4,41%	SR	4,19%	SR	4,31%	SR
28	Kota Medan	37,96%	C	36,62%	C	33,15%	C	38,47%	C	39,46%	C
29	Kota Padang Sidempuan	7,68%	SR	8,37%	SR	9,87%	SR	9,28%	SR	12,71%	R
30	Kota Pematangsiantar	14,32%	R	15,73%	R	12,44%	R	14,00%	R	12,12%	R
31	Kota Sibolga	12,93%	R	12,88%	R	11,35%	R	13,05%	R	16,83%	R
32	Kota Tanjungbalai	9,67%	SR	10,41%	R	9,84%	SR	11,71%	R	10,76%	R
33	Kota Tebing Tinggi	11,98%	R	13,79%	R	14,75%	R	15,89%	R	15,91%	R
	Rata-rata Kab./Kota	10,92%	R	11,23%	R	10,71%	R	11,64%	R	12,13%	R

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio desentralisasi seluruh kabupaten/kota di propinsi Sumatra Utara periode tahun 2017-2021 diperoleh gambaran bahwa rata-rata tingkat desentralisasi berada pada tingkat yang rendah yang berfluktuatif pada tingkat 10% – 13%. Hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah dapat dikatakan sangat kurang karena berada jauh di bawah 20%. Situasi ini menggambarkan bahwa usaha pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah belum dilakukan secara optimal.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: (1) Dilihat dari rasio efisiensi, kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di propinsi Sumatra Utara periode tahun 2017-2021 dapat dikatakan belum optimal. Hal ini karena tingkat efisiensi masih berada pada posisi tidak efisien atau persentase berada pada nilai diatas 100% ; (2) Dilihat dari rasio efektivitas, kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di propinsi Sumatra Utara periode tahun 2017-2021 dapat dikatakan baik. Hal ini karena pemerintah daerah sudah mampu menghasilkan pendapatan asli daerah sesuai dengan apa yang direncanakan, yang rata-rata persentase realisasi sudah diatas 90% ; (3) Dilihat dari rasio desentralisasi, kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di propinsi Sumatra Utara periode tahun

2017-2021 dapat dikatakan belum optimal. Hal ini karena tingkat desentralisasi masih berada jauh di bawah 20%.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah adalah pertama, pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan usaha pemungutan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan sumber daya manusia pengelola pendapatan asli daerah. Kedua, pemerintah daerah harus terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektivitas yang baik dapat bertahan secara konsisten dan dapat membantu dalam upaya peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, pemerintah daerah perlu memperhatikan kembali anggaran belanja daerah dan melakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan belanja daerah guna meningkatkan efisiensi keuangan daerah. Dan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memprioritaskan belanja daerah yang mengarah pada pembangunan sarana dan prasarana masyarakat karena sumber penerimaan asli daerah banyak yang berasal dari masyarakat berupa pajak dan retribusi daerah, hal ini dilakukan agar dapat memberikan motivasi untuk masyarakat terus ikut serta dalam pembangunan di daerahnya.

Penulis menyadari penelitian ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan yang dialami selama melakukan penulisan ini, oleh karenanya saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah: 1) Menggunakan indikator karakteristik kinerja keuangan baik itu efisiensi, efektifitas, dan desentralisasi keuangan yang bersumber dari peraturan pemerintah terbaru; 2) Menggunakan indikator tertentu dalam mengklasifikasikan daerah yang akan dianalisis, seperti misalnya kapan dan dimana saja daerah yang termasuk dalam pemekaran wilayah; 3) Menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas agar lebih tergambar secara spesifik dan rinci letak perbedaan dan perbandingannya, serta menggunakan jangka waktu terbaru.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara Tahun Anggaran 2017. Didapat dari <https://e-ppid.bpk.go.id/>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara Tahun Anggaran 2018. Didapat dari <https://e-ppid.bpk.go.id/>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara Tahun

- Anggaran 2019. Didapat dari <https://e-ppid.bpk.go.id/>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara Tahun Anggaran 2020. Didapat dari <https://e-ppid.bpk.go.id/>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2022. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara Tahun Anggaran 2021. Didapat dari <https://e-ppid.bpk.go.id/>.
- Dondan, F. C. (2021). *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Kinerja*. Thesis. Universitas Hasanuddin.
- Fadillah, I. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019*. Thesis. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Fajaruddin. (2021). *Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. *SiNTESa*, 1(1).  
<https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/395>
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (Pertama)*. Malang: CV. IRDH.
- Harahap, H. F. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- I, D. H., Rebecka, S. D., & Yanti, H. B. (2021). *Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah*. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 227–244.  
<https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9402>
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2019 di Provinsi Sumatra Utara*. (2021). Diakses dari <https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/11/IHPD-SUMUT-TA-2019.pdf>
- Indraini, A. (2021). *Sri Mulyani Sentil Pemda Banyak Program Doang, tapi Hasil Belum Jelas*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5721546/sri-mulyani-sentil-pemda-banyak-program-doang-tapi-hasil-belum-jelas>
- Iskandar, E. (2018). *Peranan Akuntansi dalam Mengukur Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Negara Ditinjau dari Akuntabilitas, Transparansi dan Teknologi*. *Jurnal Warta*.
- Lestari, A. (2020). *Analisis Pengaruh Kemampuan Penganggaran dan Motivasi Personel Urren (Urusan Perencanaan) terhadap Pencapaian Target Realisasi Anggaran pada Satuan Kerja Jajaran Polda Jateng dengan Jabatan, Jenis Kelamin, Umur, Masa Kerja, dan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Kontrol*. Thesis. Universitas

Muhammadiyah Semarang.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Maranjaya, A. K. (2022). *Penataan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi*. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.59784/glosains.v3i1.47>

Marita, I., & Hariani, S. (2020). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah*. *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2(1)

Murad, A. (2019). *Desentralisasi Fiskal dan Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di NTB*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah - ALIANSI*, 2(2). <https://doi.org/10.54712/aliani.v2i2.37>

Novikasari, L., & Zulkarnain, Z. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi*. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 204–2015. <https://doi.org/10.47080/progress.v3i2.942>

Novitasari, F. C. (2021). *Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Corporate Sosial Responsibility Disclosure dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating Studi pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2019*. Thesis. STIE Malangkucecwara.

Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018*. *Among Makarti*, 14(2). <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.213>

Raharjo, W.T., & Harnovinsah, H. (2021). *Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Banten Tahun 2013-2018)*. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 17(1), 9-23

Rahmayati, A. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. *Jurnal EKA CIDA*, 1(1), 40–54.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- S. Fahri. (2020). *Akuntabilitas, Efektivitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*. Thesis. STIE YKPN.
- Sari, D. L., & Susliyanti, E. D. (2020). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul*. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1). <https://doi.org/10.31316/akmenika.v17i1.677>
- Setiawan, I. (2018). *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi. [https://books.google.co.id/books?id=oJBiDwAAQBAJ&hl=id&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=oJBiDwAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navlinks_s)
- Sinambela, E., et al. (2016). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja*. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* , 16.
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Susanto, H. (2019). *Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Tumboimbela, G., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2022). *Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Masa Covid-19 (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)*. *Jurnal Governance*, 2(1).
- Vici Anjela Keintjem, & Sri Murni. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut*. *Jurnal EMBA*, 10(1), 953–962.
- Wahab, L. O. A., Rofingatun, S., & Kreuta, B. (2017). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura*. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 2(3). <https://doi.org/10.52062/keuda.v2i3.728>
- Yasrie, A. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014-2016*. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(2). <https://doi.org/10.35130/jrimk.v1i2.7>
- Yoyo Sudaryo, D. S. N. A. S. (2021). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi. [https://books.google.co.id/books?id=dHI9DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=dHI9DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur*. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 4(2).  
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>